

**DEMOKRATISASI PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
MENDUKUNG TERWUJUDNYA OTONOMI**

Oleh P. Sarjiman

Abstrak

Tuntutan demokratisasi pendidikan sudah seharusnya terealisasikan seiring dengan derasnya arus reformasi. Reformasi menghendaki ditegakkannya supremasi hukum dan keadilan, dijaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat, serta hidup berdampingan secara damai dalam pluralitas. Namun karena kebebasan itu sendiri sudah dirasa menjadi hak setiap warga negara, sebagian dari mereka bias dalam menerapkan dalam kehidupan. Yang terjadi adalah kekerasan, konflik, amuk masa dan tindakan-tindakan anarkis lainnya. Akibat dari tindakan tersebut, menimbulkan banyak anak-anak yang terbengkelai, sehingga hak anak untuk mendapatkan pendidikan sekolah dasar saja tidak terpenuhi. Di lain pihak, pembelajaran di sekolah dasar masih banyak yang otoriter dan belum ada suasana demokrasi, sehingga kreativitas anak belum tumbuh secara wajar. Padahal, kreativitas dapat membentuk pribadi yang mandiri.

Demokratisasi pendidikan khususnya di sekolah dasar diharapkan nantinya dapat mengurangi/menghilangkan gesekan-gesekan yang berupa kekerasan, amuk masa, konflik antar suku, golongan, ras, tawuran dan lain-lain. Nilai-nilai yang ditanamkan mulai dari sekolah dasar misalnya adalah musyawarah untuk mufakat dan kemufakatan ditaati bersama-sama demi kebaikan bersama, selain setiap siswa memiliki hak dan kewajiban yang sama, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan dasar. Maka dalam praktik persekolahan di sekolah dasar, demokrasi harus benar-benar ditegakkan melalui suasana kehidupan di sekolah dan praktik pembelajaran. Dengan jiwa demokrasi yang tertanam di sanubari setiap siswa, akan membentuk pribadi-pribadi yang mandiri dan pada gilirannya akan mempermudah dan mendukung terwujudnya otonomi pada setiap pengelolaan usaha, terutama pengelolaan sekolah.

Pendahuluan

Mengamati tuntutan masyarakat di era reformasi ini, mengisyaratkan bahwa perlu ditegakkannya demokrasi, supremasi hukum dan hak asasi manusia dijunjung tinggi. Agar idealisme tersebut terwujud, nilai-nilai dan semangat yang mendasarinya harus ditanamkan sejak usia dini dan secara formal di sekolah dasar. Penanaman nilai-nilai kepada peserta didik tidak cukup hanya disuguhkan dalam bentuk informasi, namun harus diikuti dengan pembudayaan nilai-nilai tersebut dengan contoh-contoh dalam praktek kehidupan sesungguhnya. Dengan andilnya para pendidik dalam membentuk pribadi-pribadi yang demokratis dan nilai-nilai yang mengikutinya, nantinya akan muncul pemimpin-pemimpin bangsa ini yang memiliki sifat demokratis dan bermoral.

Fenomena tuntutan masyarakat yang marak akhir-akhir ini, menurut banyak kalangan bersumber dari kehidupan yang selama orde baru kurang memberi peluang bagi berkembangnya potensi individual dan kolektif yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Segala sesuatu diatur dan dikomando dari pusat secara sentralistik. Bidang pendidikan juga tidak luput dari kebijakan tersebut. Penguasa telah menggunakan pendidikan sebagai media untuk kepentingan-kepentingan individu dan kelompoknya. Sebagai contoh kebijakan pengedaran buku teks, buku paket termasuk penyelenggaraan evaluasi belajar. Pemerintah pusat selalu mengarahkan, mengontrol dan sekaligus memetik kepentingan politis dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari kebijakan pada tingkat makro seperti penyusunan kurikulum, manajemen pendidikan dan bahkan sampai tingkat mikro seperti proses pendaftaran dan penerimaan siswa baru. Karena pendidikan yang terlalu sentralistik, serba menunggu perintah dan petunjuk dari pusat, mengakibatkan ketidakmampuan warga negara dalam mengembangkan kreativitas, kemandirian, adaptivitas serta

kemampuan kooperasi dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan maupun peluang yang terjadi dalam kehidupan ini.

Kebijakan pendidikan pada masa orde baru juga terpengaruh oleh kebijakan strategi pembangunan nasional, yaitu stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Namun demikian, kenyataannya yang berjalan sangat dominan adalah pertumbuhan ekonomi. Dan dalam prakteknya pertumbuhan ekonomi hanya dikuasai oleh beberapa gelintir orang dengan sistem konglomerasinya, serta pemerataan sama sekali tidak terealisasi. Akibat terpengaruhnya pendidikan yang hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi, mengakibatkan pada sikap demokratis, toleransi, pengakuan atas hak orang lain, moral etika budi pekerti luhur sebagai manusia Indonesia menjadi kabur atau hilang. Yang tumbuh subur selama ini adalah merebaknya KKN, tindak kekerasan, kerusuhan, amuk masa, pembunuhan dengan dalih perbedaan suku ras dan agama (bernuansa sara), permusuhan kelompok-kelompok yang dianggap berlawanan serta memunculkan teror dan tindakan anarki lainnya. Akibatnya banyak keluarga yang terlantar dan pada gilirannya masa depan anak dikorbankan. Di daerah-daerah tertentu banyak anak yang tidak dapat mendapatkan pendidikan sekolah dasar yang menjadi haknya. Di samping itu, pendidikan sering dijadikan komoditas ekonomi, sehingga terjadi kebocoran EBTANAS, jual beli gelar dan sebagainya.

Menyadari realitas tersebut kiranya perlu dilakukan upaya-upaya pembaruan untuk menempatkan pendidikan pada proporsinya, yaitu mewujudkan masyarakat yang demokratis, mandiri, menghargai perbedaan menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai yang dicita-citakan masyarakat Indonesia baru sekarang ini. Dengan pemberian keleluasaan pengelolaan, manajemen maupun kebijakan pendidikan mulai sekolah dasar pada khususnya

dan pendidikan dasar pada umum-nya, akan memperlancar terwujudnya otonomi, khususnya di bidang pendidikan.

Demokratisasi Pendidikan Dasar

Di negara manapun sebenarnya pendidikan tidak pernah netral (independent), baik dalam makna ekonomik dan apalagi politik. Menurut Freire (1985:187), kebijakan pendidikan memiliki dimensi politik dan kebijakan politik memiliki dimensi pendidikan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki tempat yang strategis untuk menanamkan kepentingan-kepentingan termasuk idiologi. Karena sering terjadinya pemaksaan-pemaksaan kepentingan, maka pendidikan itu sendiri tidak terletak pada tempatnya, kehilangan jati dirinya yang seharusnya mengedepankan demokrasi, toleransi, hidup berdampingan secara damai dan nilai-nilai positif lainnya yang menjadi hakikat pendidikan.

Hubungan antara pendidikan dan demokrasi dikemukakan oleh Adler (1982) dalam *The Paidea Proposal* bahwa dalam suatu negara yang demokratis setiap warga negara terlibat dalam pembangunan negara serta setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setiap warga negara juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengenyam pendidikan. Dalam pendidikan yang demokratis, setiap siswa kecuali jika mereka mempunyai kelainan, haruslah mendapatkan pendidikan yang terbaik; *the best education for the best is the best education for all* (Adler, 1982: 27). Menurut dia, pada hakikatnya seluruh anak dapat dididik, dia menambahkan bahwa tidak ada anak yang tidak dapat diajar. Adler memang menginginkan bahwa setiap siswa memperoleh pendidikan dasar yang sama yang merupakan hak bagi setiap warga negara. Negara perlu memikirkan apa pendidikan yang terbaik bagi warganya dan apa

isinya. Secara umum Adler mengemukakan bahwa beberapa bahan dasar yang harus dipelajari siswa; yaitu pengetahuan bahasa, pengetahuan sosial, dan pengetahuan sains serta matematika. Pengetahuan dasar tersebut menyiapkan pikiran dan kemampuan orang untuk nantinya terlibat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ini berarti pelaksanaan demokratisasi pendidikan mendapat jaminan secara konstitusional. Realisasi dari amanat UUD tersebut dilaksanakan melalui wajar 9 tahun, walaupun pada akhir-akhir ini jalannya terseok-seok akibat krisis ekonomi dan instabilitas keamanan di tanah air. Tanpa pengetahuan yang cukup mendasar tersebut, nampaknya orang mengalami kesulitan untuk terlibat secara aktif dalam suatu negara yang demokratis. Misalnya; tanpa pengetahuan dasar orang akan sulit mengikuti apa yang sedang bergerak, terjadi dalam masyarakat, menangkap berita-berita yang ada dalam surat kabar maupun media komunikasi yang lain.

Jadi, walaupun krisis ekonomi belum menunjukkan segera berakhir dan konflik-konflik insidental sering terjadi di daerah-daerah tertentu, pemerataan dan demokratisasi pendidikan perlu tetap dipertajam. Perlu adanya jaminan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang merata untuk semua kelompok strata ekonomi di seluruh tanah air sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya. Peningkatan demokratisasi pendidikan menurut Muljani A. Nurhadi (1999:6) dapat melalui: (1) meningkatkan peluang memperoleh pendidikan yang layak bagi penderita yang cacat, genius, anak desa, dan putus sekolah untuk menyelesaikan pendidikan dasar; (2) mengintensifkan pendidikan anak usia dini untuk merintis keunggulan; (3) mengembangkan pendidikan masyarakat dan pendidikan mata pencaharian. Di

samping itu, proses pendidikan yang demokratis perlu diselenggarakan secara profesional, sehingga mutu pendidikan tidak akan dikorbankan.

Demokratisasi dan Otonomi Pendidikan

Dengan adanya demokrasi pendidikan, khususnya di sekolah dasar, para *stakeholders*, guru, peserta didik dan para pelaku pendidikan yang terlibat memiliki kesempatan dan keleluasaan dalam mengelola, mengembangkan dan berinteraksi dalam kehidupan sosialnya. Dalam hal ini, para pelaku pendidikan diharapkan memiliki otonomi untuk menentukan tujuan pembelajaran, materi pembelajarannya dan sekaligus proses pembelajarannya. Namun demikian tidak berarti mereka boleh bertindak menurut kemauannya sendiri, tetapi mereka dapat bekerja secara kooperatif dan sinergis, tanpa ada intervensi dan pemaksaan kehendak satu terhadap yang lainnya. Dengan keleluasaan seperti telah disebutkan tadi, diharapkan pendidikan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik secara holistik/ komprehensif baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat melalui antara lain meningkatnya kemampuan peserta didik untuk belajar, melakukan upaya ke arah yang lebih baik dalam belajarnya dan berkembangnya keinginan untuk selalu belajar.

Otonomi pendidikan diharapkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dan diversifikasi program. Masyarakat diberikan peluang yang luas dan meningkatkan kemampuannya, sehingga terjadi diversifikasi program pendidikan sesuai dengan sifat multikultural bangsa Indonesia. Dengan begitu, peran pemerintah mulai dikurangi, dan suatu saat pemerintah hanyalah sebagai fasilitator. Pengembangan sistem manajemen yang berbasis sekolah perlu dicobakan. Di samping itu, perlu diterapkannya sistem manajemen mutu

secara menyeluruh yang merupakan penataan kembali manajemen organisasi di semua tingkat, kelembagaan dan proses pembelajaran di kelas. Program pendidikan perlu dilaksanakan secara luwes dengan berpegang pada mutu, relevansi, dan berazaskan kemandirian. Tidak kalah pentingnya, harus selalu menjaga kerjasama yang harmonis antara tri pusat pendidikan, yaitu: keluarga, sekolah dan masyarakat; terutama pendidikan sekolah dasar yang masih sangat menggantungkan pada keluarga. Pada jangka panjang-nya, perlu diterapkan sistem perencanaan pendidikan yang berbasis kepentingan lokal, namun berorientasi nasional dan berwawasan global. Untuk daerah-daerah yang terbelakang, namun ada potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, perlu diberikan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja lokal tersebut, sehingga jika terpaksa siswa sekolah dasar tidak dapat melanjutkan sekolah, sudah mampu mengolah potensi sumber daya alam setempat untuk kepentingan kehidupannya. Sebaliknya untuk daerah-daerah perkotaan yang sudah berkembang pesat, kebutuhan pendidikan sudah disesuaikan dengan tuntutan global, sehingga tambahan keterampilan dasar berbahasa Inggris perlu diberikan. Agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, maka mata pelajaran mulok (muatan lokal) perlu diwujudkan.

Dengan begitu, diharapkan pendidikan nantinya akan relevan dengan kebutuhan lulusan dalam memasuki dunia kerja dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan tuntutan. Selain itu, untuk kota-kota besar tertentu sudah banyak sekolah dasar yang sudah mampu membiayai sendiri dan bahkan tidak sedikit sekolah dasar yang sudah tercukupi secara finansial. Sekolah-sekolah dasar tersebut biasanya yang tergolong favorit dan berkualitas tinggi dan para orang tua / wali sangat mendukung secara finansial. Dengan realitas

tersebut, sekolah dasar-sekolah dasar yang memiliki kondisi seperti itu sudah siap diterapkan otonomi.

Realitasnya otonomi pendidikan sekolah dasar di pinggiran dan daerah pelosok, berkaitan erat dengan otonomi daerah, sebab di samping siswa sekolah dasar setempat terkait dengan kemakmuran daerah yang bersangkutan, pengelolaan administrasi kepegawaian guru sekolah dasar juga masih terkait dengan departemen dalam negeri. Pada sisi otonomi daerah, otonomi pendidikan mengarah pada menipisnya kewenangan pemerintah pusat dan mengembangkannya kewenangan daerah otonom atas bidang pemerintahan berlabel pendidikan yang harus disertai dengan tumbuhnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat (Yoyon Suryono, 2000:3). Pada tingkat persekolahan, otonomi pendidikan berjalan atas dasar desentralisasi dan prinsip *School based management* pada tingkat pendidikan dasar dan sekolah dasar pada khususnya, penataan kelembagaan pada level dan tempat yang tepat menjadi faktor kunci keberhasilan otonomi pendidikan (Yoyon Suryono, 2000:4).

Kebijakan otonomi diusahakan sejalan dengan kebijakan akuntabilitas pendanaan pendidikan. Diusahakan untuk senantiasa meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana pendidikan dengan mengarah ke desentralisasi pengelolaan serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat, orang tua, dan dunia bisnis. Secara bertahap, berencana dan sistematis, paradigma pengelolaan pendidikan mulai digeser dari pengelolaan pendidikan yang selalu bertumpu pada pemerintah ke arah bertumpu pada masyarakat. Institusi pendidikan pada tingkat nasional hendaknya hanya berkompeten pada pengendalian standar mutu, personil, pengaturan dan pembinaan program. Otoritas dan kreativitas daerah perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan efektivitas manajemen pendidikan, perlu ditingkatkan pula otonomi dan peran sekolah, staf profesional termasuk

masyarakat. Perlu dikaji dan dirintis sistem pendidikan yang juga berbasis pada masyarakat serta pola otonomi lembaga kependidikan yang bertanggung jawab dalam rangka demokratisasi pendidikan. Karena sekolah dasar merupakan sekolah formal yang berada di tingkat terendah, maka suasana demokrasi perlu diwujudkan dan otonomi pengelolaan sudah dapat dicobakan.

Pendidikan sekolah dasar bagi anak-anak terlantar korban kerusuhan, kekerasan dan permusuhan perlu dipikirkan pemecahannya. Gagasan pendidikan alternatif yang telah dilontarkan oleh MENDIKNAS perlu didukung dengan alternatif-alternatif praktik pelaksanaan yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, tenaga, pembiayaan, waktu dan kesempatan setempat. Program ini untuk mewujudkan demokratisasi pendidikan yang sekaligus memberikan hak anak bangsa untuk mengenyam pendidikan yang paling dasar.

Realisasi Demokrasi di Sekolah Dasar

Dewey dalam bukunya *Democracy and Education*, (1966) mengemukakan bahwa pendidikan demokratis bukan hanya untuk menyiapkan siswa bagi kehidupan nanti di masyarakat, namun demikian sekolah sendiri merupakan *masyarakat mini*, sehingga kehidupan dan praktek demokrasi dapat berjalan di lingkungan sekolah. Siswa harus dilatih berdemokrasi di masyarakat, dan menjalankannya dalam suasana yang demokratis serta tidak hanya mendapat informasi tentang demokrasi. Di dalam sekolah, siswa dapat menentukan aturan kelas bersama-sama secara demokratis. Agar dapat berpartisipasi dalam masyarakat yang nyata, parasiswa dibiarkan hidup dan berpartisipasi dalam situasi sekolah yang mirip dengan masyarakat yang sesungguhnya. Dengan begitu, siswa akan lebih mudah untuk praktik, terlebih untuk berpraktik demokrasi seperti yang dialami masyarakat.

Gagasan Dewey tersebut masih ada pertanyaan; "Masyarakat mini macam apa yang perlu ditiru?" Karena guru, siswa, pengurus sekolah dan penentu kebijakan pemerintah secara fakta berasal dari bermacam-macam strata masyarakat, maka tidak mudah untuk menentukan jenis masyarakat apa yang mau digambarkan di sekolah. Menurutnya, yang penting adalah bahwa sekolah mencerminkan masyarakat yang ideal yang lebih maju dengan memajukan nilai-nilai yang lebih tinggi. Dengan demikian, masyarakat sekolah yang satu dengan yang lain dimungkinkan ada sedikit perbedaan, sebab masyarakat ideal yang menjadi cerminan dapat saja berbeda. Namun demikian, macam-macam kemajuan yang dibuat sekolah, diharapkan masyarakat sekitar mendapatkan dampaknya, yaitu menjadi masyarakat yang lebih maju.

Demokrasi bagi Dewey adalah suatu cara untuk hidup bersama-sama di mana keputusan disepakati bersama-sama oleh anggota masyarakat dalam suatu proses untuk memperoleh hidup yang damai sejahtera. Suatu aturan atau hukum diuji coba secara empiris apakah bisa berlaku selamanya ataukah sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. Demokrasi itu sendiri merupakan suatu proses yang setiap saat perlu ditinjau kembali dan jika perlu aturan atau kesepakatan dapat direvisi atau bahkan diganti. Demikian pula aturan-aturan di sekolah setiap saat perlu dilihat kembali dan disempurnakan sehingga aturan tersebut tidak kaku dan mati

Suasana demokrasi di sekolah dapat diwujudkan dengan adanya suatu suasana yang saling menerima, mau hidup bersama dalam perbedaan, dapat menghargai gagasan orang lain, ditegakkannya keadilan, tidak represif, tidak diskriminatif dan ada tanggung jawab (Gutmann, 1987). Perbedaan pendapat itu wajar, namun harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat yang merupakan titik temu pendapat. Dalam

perkembangan dan keputusan sekolah siswa perlu dilibatkan walaupun hanya sedikit, hal ini menunjukkan perwujudan demokrasi. Dalam hal ini tentu saja banyak diwakili oleh orang tua/wali mereka bersama-sama dengan guru dan kepala sekolah dalam *policy* sekolah. Dalam menuntut ilmu dan pelayanan sekolah tentu tidak ada perbedaan suku, ras, agama ataupun golongan. Siswa perlu mencoba untuk mengerti ciri-ciri demokrasi yang nantinya akan berguna bagi mereka. Siswa juga diberi kesempatan hidup dalam suasana demokratis dan melaksanakan kedemokratisan itu sendiri dalam masyarakat sekolah meskipun secara terbatas.

Pelaksanaan demokrasi di sekolah sering terhambat sebab pembelajaran sering tidak kondusif untuk berlangsungnya demokrasi. Menurut Freire (1990), model pendidikan yang banyak dilakukan selama ini merupakan *banking concept of education (banking system)*. Lebih lanjut dia mengemukakan bahwa yang terjadi adalah guru mengajar dan siswa diajar, guru berbicara dan siswa mendengarkan, guru berpikir dan siswa dipikirkan, guru tahu semuanya dan siswa tidak mengerti apa-apa, guru adalah subjek dan siswa adalah objek dari proses belajar. Dari ungkapan Freire tersebut jelas bahwa gurulah yang berkuasa dan menentukan segala-galanya dan siswa hanyalah dianggap barang yang tidak berdaya dan bisa diapakan saja menurut kemauan guru.

Jika pembelajaran ingin membantu proses demokratisasi, maka metode pembelajaran dirubah menjadi situasi yang mendorong siswa untuk kreatif, tidak tertekan, berani mengemukakan pemikirannya dan memiliki ciri-ciri lain seperti berikut ini.

1. Indoktrinasi perlu dihilangkan dan diusahakan model pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk menanggapi bahan

pelajaran, mempertanyakan bahan dan kritis serta ikut mendiskusikannya bahan tersebut.

2. Siswa diberi kesempatan untuk menemukan beberapa alternatif dalam mempelajari ataupun memecahkan masalah dalam suatu bahan. Dalam mengerjakan matematika misalnya, siswa diperbolehkan mengerjakan dengan caranya yang lain selain cara yang dijelaskan guru. Multi suatu persoalan.
3. Siswa perlu didukung untuk mau dan berani mengungkapkan gagasannya dan mengajukan usulan. Dalam hal ini siswa boleh salah dalam mengemukakan pendapatnya. Kesalahan adalah hal yang wajar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Siswa yang banyak bicara dan usul jangan dianggap sebagai pengganggu.
4. Gunakanlah metode yang cocok, mungkin merupakan campuran beberapa metode (*eclectic method*) dan jika perlu pengamatan situasi konkret di luar sekolah. Siswa perlu dilatih untuk aktif membuat dugaan sementara, mengumpulkan data, menganalisis secara sederhana, dan mengambil kesimpulan. Metode ceramah jangan dijadikan satu-satunya metode pembelajaran
5. Siswa perlu dilatih berpikir kritis (*critical hinking*) mereka perlu dilatih untuk selalu mengemukakan alasan yang rasional dalam mengungkapkan gagasan mereka, atau jika perlu menganalisis dan menanggapi pembicaraan para tokoh masyarakat.

Benih Otonomi pada Demokratisasi Pendidikan Sekolah Dasar Susana sekolah yang demokratis sangat mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan kritis. Dengan begitu siswa akan mempunyai inisiatif sendiri untuk maju dan mengatasi masalahnya sendiri. Dengan kata lain, siswa sudah dilatih untuk

untuk berkomunikasi dan hidup di tengah masyarakat. Dalam praktik kehidupan sekolah harus diciptakan suasana demokratis sehingga siswa berkembang kreativitasnya, menaati kesepakatan demi kebaikan bersama, menghargai perbedaan baik suku, ras, agama, sehingga tercipta perdamaian. Dalam proses pembelajaran perlu diciptakan iklim yang demokratis dan kondusif agar siswa dapat berpikir kreatif mencari, menyelidiki dan menentukan sendiri. Suasana seperti itu mendukung siswa untuk dapat mandiri dan kemandirian dapat menopang otonomi dalam pengelolaan setiap kegiatan.

Daftar Pustaka

- Adler, M. (1982). *The Paidea Proposal. An Educational Manifest*. New York: Collier Books.
- Dewey, J. (1966). *Democracy and Education*. New York: The Free Press
- Freire, Paulo (1985). *The Politics of Education*. New York : Bergin & Garvey.
- Freire, Paulo. (1990). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
- Gutmann, A. (1987). *Democratic Education*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Yoyon Suryono. (2000). Arah Kebijakan Ekonomi di Dunia Pendidikan. Makalah disampaikan pada seminar "Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Kebijakan Otonomi" Yogyakarta: LEMLIT. UNY. 13 Maret 2000.
- Mulyani A. Nurhadi. (1999). *AGENDA PEMBARUAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENDIDIKAN NASIONAL MENYONGSONG ABAD XXI*. Makalah pada Seminar sehari, Reorientasi Kebijakan Pendidikan dalam Reformasi Pembangunan Nasional, diselenggarakan oleh pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan Lembaga Penelitian IKIP YOGYAKARTA, 13 MARET 1999.